



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **39** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN,
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025
SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR ...39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 39 Tahun 2025
TANGGAL : 15 - 8 - 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;
- XXXV. KECAMATAN LEKOK;

- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

**RENCANA KERJA KECAMATAN GRATI
TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

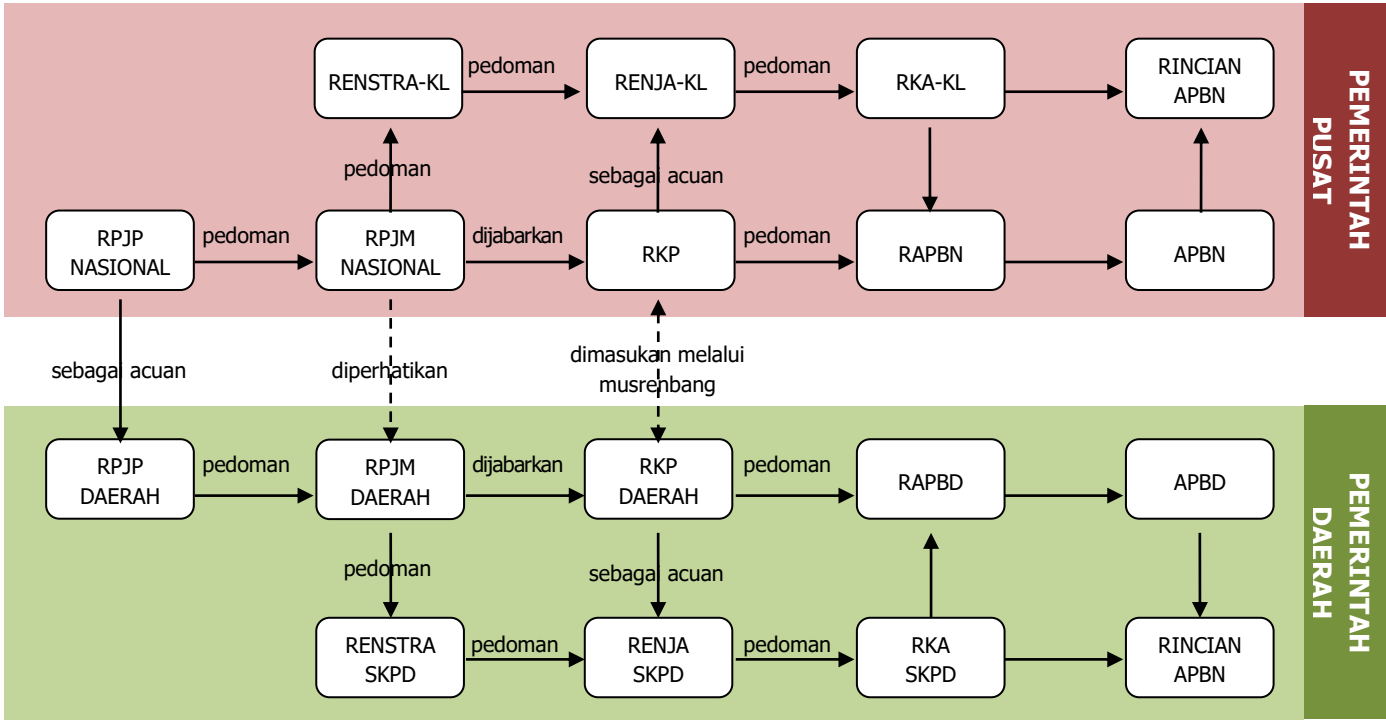
1.1. LATAR BELAKANG

Renja Kecamatan Grati disusun dalam rangka untuk perencanaan pembangunan tahunan berdasarkan renstra 2024-2026, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Renja Kecamatan Grati Tahun 2026 merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggung jawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepan dituntut untuk lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Renja Kecamatan Grati disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Grati untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Grati merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasara dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Grati;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Grati untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026;
3. Renja Kecamatan Grati merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Grati pada Tahun

2026 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Grati.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Grati yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Grati;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Grati.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Grati Tahun 2026 disusun dengan berdasarkan atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
3. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (lembaran negara republic Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pemberian penghargaan atau insentif inovasi daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5/1317/2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang RPD Kab Pasuruan
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang SOTK Kecamatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategi Kecamatan Grati tahun 2024-2026
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Pasuruan
17. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Inovasi Daerah.
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 113 Tahun 2024 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pasuruan
20. Surat Edaran Nomor 500.10.30.2/4114.2/424.101/2024 tentang Pelaporan Inovasi Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran rpd Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Rencana Strategis Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;

3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan subkegiatan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada Tahun 2026.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan sebagai berikut :

1. Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh SKPD;
2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Grati disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Landasan Hukum**
- 1.3 Maksud dan Tujuan**
- 1.4 Sistematika Penulisan**

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Grati**
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah**
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

3.3.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tahun 2026

**3.3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung
Prioritas Daerah Tahun 2025**

**3.3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung
Proyek Strategis (jika ada)**

**3.3.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung
Inovasi Perangkat Daerah**

**3.3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung
IK RPJPD**

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN GRATI
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Grati Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Grati Tahun 2018-2024 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Grati ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Grati melalui tabel T-C.29 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
						Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)		Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Kewilayahan													
	Kecamatan													
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kebutuhan Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen pengendalian SAKIP Prosentase dokumen pengendalian SAKIP Prosentase dokumen pengendalian SAKIP	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	dok		3	dok	3	dok	100%	3	dok	6	66.7

7.01.01.2.01.0006	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dok		2	dok	2	dok	100%	2	dok	4	66.7
7.01.01.2.01.0007	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	dok		4	dok	0	dok	0%	4	dok	4	33.3
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.01.2.02.0001	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	orang/bulan		22	orang/bulan	20	orang/bulan	91%	22	orang/bulan	42	63.6
7.01.01.2.02.0002	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	dok		12	bulan	12	bulan	100%	12	bulan	24	66.7
7.01.01.2.02.0003	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12	dok		4	dok	4	dok	100%	4	dok	8	66.7
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.01.2.05.0004	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	36	dok		12	dok	0	dok	0%	0	dok	0	0

7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9	orang		3	keg	0	keg	0%	0	keg	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket		4	paket	4	paket	100%	4	paket	8	66.7
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	paket		12	paket	12	paket	100%	12	paket	24	66.7
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	paket		4	paket	4	paket	100%	4	paket	8	66.7
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket		4	paket	4	paket	100%	4	paket	8	66.7
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket		4	paket	4	paket	100%	4	paket	8	66.7
7.01.01.2.06.0006	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	laporan		10	lap	10	lap	100%	10	lap	20	66.7

7.01.01.2.06.0009	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45	laporan		15	lap	15	lap	100%	15	lap	30	66.7
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.01.2.07.0005	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	paket		0	paket	0	paket	0%	1	paket	1	25
7.01.01.2.07.0006	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	paket		1	unit	1	unit	100%	1	unit	2	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.01.2.08.0002	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan		12	lap	12	lap	100%	12	lap	24	66.7
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Brg Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100

7.01.01.2.09.0001	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan</i>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	unit		1	unit	1	unit	100%	1	unit	2	66.7
7.01.01.2.09.0002	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	unit		9	unit	9	unit	100%	9	unit	18	66.7
7.01.01.2.09.0005	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	mebel		5	mebel	5	mebel	100%	5	mebel	10	66.7
7.01.01.2.09.0006	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	unit		10	unit	10	unit	100%	10	unit	20	66.7
7.01.01.2.09.0009	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	gedung		4	gedung	4	gedung	100%	4	gedung	8	66.7
7.01.01.2.09.0011	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	gedung		2	gedung	2	gedung	100%	2	gedung	4	100

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terfasilitasi Tepat Waktu	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase keg pemrintahn yang dpt dikoordinasikan dan dilaksanakan	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.02.2.01.0001	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait</i>	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15	laporan		5	lap	5	lap	100%	5	lap	10	66.7
7.01.02.2.01.0002	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan</i>	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan (Kantor Kecamatan)	12	dok		4	dok	4	dok	100%	4	dok	8	66.7
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.02.2.04.0003	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	Jumlah laporan pemungutan PBB P2	12	laporan		4	lap	4	lap	100%	4	lap	8	66.7

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kmasarakatan Desa/ Kel yang Aktif	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase meningkatnya kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	48	dokumen		16	dok	16	dok	100%	0	dok	16	33.3
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	laporan		5	lap	5	lap	100%	5	lap	10	66.7
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Trantibum	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6	laporan		2	lap	0	lap	0%	2	lap	2	33.3

7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9	laporan		3	lap	1	lap	33%	1	lap	2	22.2
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3	laporan		1	lap	0	lap	0%	1	lap	1	33.3
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Trantibum	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Tugas Pemerintahan Umum	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	450	orang/ siswa		150	orang/ kegiatan 4 kegiatan	150	orang/ kegiatan 4 kegiatan	100%	150	orang/ kegiatan 4 kegiatan	300	66.7

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tata Kelola Pemdes sesuai ketentuan	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	42	dok		14	dok	0	dok	0%	14	dok	14	33.3
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	42	dok		0	dok	0	dok	0%	14	dok	14	33.3
	Kelurahan Gratitunon													
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang Terfasilitasi Tepat Waktu	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase keg pemrintahn yang dpt dikoordinasikan dan dilaksanakan	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan (Kantor Kelurahan)	12	dok		4	dok	4	dok	100%	4	dok	8	66.7

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Aktif	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase meningkatnya klmpk masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	100
7.01.03.2.02.0002	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22	sarpras		5	sarpras	7	sarpras	140%	5	sarpras	12	54.5
7.01.03.2.02.0003	<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	pokmas		4	pokmas	6	pokmas	150%	4	pokmas	10	55.6

Tabel 2.1.A
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025		Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	33.3	33.3	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	33.3	63.6	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya

Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dan kantor</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Pengadaan Mebel</i>	25	25	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	50	100	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Pemeliharaan Mebel</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	50	100	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikkan target kinerja pada tahun berikutnya

<i>Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	memtahps	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	33.3	66.7	melampnui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	0	33.3	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	33.3	66.7	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan</i>	33.3	33.3	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya

<i>Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh</i>	11.1	22.2	melampaui	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	33.3	33.3	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	33.3	66.7	melempau	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	33.3	33.3	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	33.3	33.3	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
Kelurahan Gratitunon					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	33.3	66.7	melempau	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	100	memenuhi	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	22.7	54.5	melampau	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya
<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	22.2	55.6	melampau	melaksanakan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditentukan	Mempertahankan capaian target dan menaikan target kinerja pada tahun berikutnya

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Grati sampai dengan triwulan keempat tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Didalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *output* kegiatan yang menunjang efektifitas program/ kegiatan;
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/ kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Grati dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Grati pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompetensi (*reward and punishmen*), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga

- tercapai efektifitas dan efisiensi;
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Grati dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah;
 3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi antar sektor.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GRATI

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Grati merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Grati dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Dalam merealisasi Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026, agar pelaksanaan kegiatan yang telah disusun tepat sasaran dan dapat diukur pencapaian pelaksanaan kegiatannya pada akhir tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang lebih spesifikasi dan terukur, maka Kecamatan Grati mempunyai tujuan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan", dengan sasaran pertama "Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa" sasaran kedua "Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah". Untuk mencapai sasaran tersebut maka, ada beberapa indikator yang harus dilaksanakan yaitu :

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
- 2) Persentase Penyelenggaraan Kecamatan
- 3) Nilai SAKIP Perangkat Daerah

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2024. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Grati disajikan pada tabel T-C.30 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			95	95	98		99.3		98		realisasi 2024 sdh melebihi target 2024, maka proyeksi 2026 /2027 disesuaikan
	Persentase Penyelenggaraan Kecamatan			100%.	100%	100%		100%		100%		target 2026/2027 masih relevan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			78	80	82		75.2		82		target 2026/2027 masih relevan

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Grati ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:

1) Minimnya inovasi pelayanan Publik

Inovasi dapat memperbaiki pelayanan publik melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi dapat menghasilkan solusi baru untuk masalah yang ada dalam pelayanan kepada publik, sehingga membuat pelayanan menjadi lebih baik dan memuaskan bagi masyarakat. Hal ini masih menjadi kendala tersendiri dilingkungan Kecamatan Grati, upaya peningkatan pelayanan publik berorientasi pada pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi program.

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.

Peran masyarakat dan kalangan dunia usaha merupakan hal yang penting dalam rangka pengembangan wilayah. Melalui pelibatan masyarakat dan dunia usaha diharapkan :

- a. Adanya masukan dan solusi untuk pengembangan wilayah yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
- b. Dukungan sumber daya dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur wilayah.
- c. Terwujudnya sinergi dan efisiensi dalam rangka upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan ekonomi wilayah.

3) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menunjang pelayanan publik yang prima. Upaya mewujudkan pelayanan prima masih dipahami dalam konteks kecepatan pemberian layanan, belum dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pada satu sisi pemanfaatan teknologi informasi dapat membawa beberapa manfaat, antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelayanan publik.
- b. Memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
- d. Menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih modern dan inklusif.
- e. Mempermudah pengukuran kualitas pelayanan publik dan monitoring pelaksanaannya.
- f. Meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.

4) Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Aparatur.

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan pelaksanaan tugas yang baik dan sukses. Kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur akan

mempengaruhi kualitas pelaksanaan tugas, sehingga dapat menjamin keberhasilan tugas. Sedangkan kemampuan dan keahlian aparatur dalam melakukan tugas yang dibebankan kepadanya akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

- 5) Belum terwujudnya integrasi dokumen perencanaan antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa;

Dokumen perencanaan merupakan hal penting dalam memastikan bahwa suatu program/ kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dan juga dapat menjamin bahwa semua aspek dan unsur yang terkait dapat terkoordinasi dan saling berhubungan, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Grati dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar sebagai berikut:

- 1) Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan pejabat/ staf pelaksana;
- 2) Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal. Perbaikan mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas, perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Upaya perbaikan mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal, dilakukan dengan :
 - a. Penataan aparatur sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
 - b. Perumusan Standart Operasional Prosedure yang jelas.
 - c. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar unit.
 - d. Peningkatan sistem dan teknologi yang memadai.
- 3) Penerapan sasaran dan indikator pencapaian target kinerja belum terformulasikan secara jelas. Penyempurnaan sasaran dan indikator pencapaian target kinerja perlu segera dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Perumusan sasaran dan indikator pencapaian target kinerja yang belum terformulasikan secara jelas dapat menyebabkan beberapa masalah, antara lain :
 - a. Kurangnya arah dan tujuan: tanpa sasaran dan indikator yang jelas, tugas dan tanggung jawab tidak terdefinisikan dengan baik, sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensi kerja.
 - b. Kesulitan dalam evaluasi: tanpa indikator yang jelas, sulit untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dan hasil kerja.
 - c. Kurangnya motivasi dan dorongan: tanpa sasaran yang jelas dan indikator yang memadai, karyawan kehilangan arah dan motivasi untuk bekerja secara optimal.

- 4) Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan.
- Perubahan kebijakan diiringi dengan adanya perubahan regulasi, sehingga menuntut kemampuan aparatur untuk memahami dan menterjemahkan dalam pelaksanaan tugasnya.
- Perbaikan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD

RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini. Berikut proses review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang tingkat Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang fisik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review rancangan awal rencana kerja tahun 2026.
2. Alasan proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum

sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh Kecamatan Grati sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Grati

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Kantor Kecamatan Grati	Persentase Kebutuhan Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi	100%	13,149,391,739	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Kantor Kecamatan Grati	Persentase Kebutuhan Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi	100%	14,274,775,913	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Prosentase dokumen pengendalian SAKIP	100%	18,150,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Prosentase dokumen pengendalian SAKIP	100%	19,965,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3,850,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	4,235,000	
	Koord. dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	2,750,000	Koord. dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	3,025,000	
	Koord. dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dok	3,300,000	Koord. dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dok	3,630,000	
	Koord. dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dok	2,750,000	Koord. dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dok	3,025,000	

	Koord. dan Peny. Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	2,750,000	Koord. dan Peny. Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	3,025,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	2,750,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	3,025,000	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kantor Kecamatan Grati	Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	100%	12,393,658,539	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kantor Kecamatan Grati	Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	100%	13,633,024,393	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 org/ bln	10,940,345,858	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 org/ bln	12,034,380,444	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dok	1,393,920,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dok	1,533,312,000	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 dok	59,392,681	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 dok	65,331,949	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Persentase pemenuhan adm BMD	100%	5,500,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Persentase pemenuhan adm BMD	100%	6,050,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dok	2,750,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dok	3,025,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 lap	2,750,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 lap	3,025,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	100%	25,300,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	100%	61,329,019	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	33,499,019	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dok	2,750,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dok	3,025,000	
	Koord. dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dok	2,750,000	Koord. dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dok	3,025,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 dok	2,750,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 dok	3,025,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 org	11,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 org	12,100,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah org yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 org	6,050,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah org yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 org	6,655,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	375,058,200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	394,414,020	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	77,677,600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	85,445,360	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	80,130,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	88,143,660	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	49,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	54,450,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	16,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	18,150,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	16,500,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	18,150,000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 dok/ expl	8,250,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 dok/ expl	9,075,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 lap	38,500,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 lap	42,350,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koord. dan Konsultasi SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 lap	74,750,000	Penyelenggaraan Rapat Koord. dan Konsultasi SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 lap	78,650,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 kgt	16,500,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kantor Kecamatan Grati	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 kgt	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	35,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	35,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	
	Pengadaan Meubelair	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	20,000,000	Pengadaan Meubelair	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	35,000,000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	15,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	
	Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	104,500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	114,950,000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 lap	71,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 lap	78,650,000	
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 lap	13,750,000	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 lap	15,125,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	19,250,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	21,175,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Brg Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	183,975,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Brg Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	106,372,500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	53,625,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	58,987,500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	5,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	6,050,000	
	Pemeliharaan Meubelair	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 meubel	7,150,000	Pemeliharaan Meubelair	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 meubel	7,865,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	7,700,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	8,470,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 gedung	55,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 gedung	25,000,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 gedung	55,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 gedung	-	
	PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Kecamatan Grati	Persentase Pelayanan yang Terfasilitasi Tepat Waktu	100%	193,050,000	PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kantor Kecamatan Grati	Persentase Pelayanan yang Terfasilitasi Tepat Waktu	100%	212,355,000	

	Koord. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Grati	Persentase keg pemrintahn yang dpt dikoordinasikan dan dilaksanakan	100%	183,700,000	Koord. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Grati	Persentase keg pemrintahn yang dpt dikoordinasikan dan dilaksanakan	100%	202,070,000	
	Koord./ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 lap	68,200,000	Koord./ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 lap	75,020,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan (Kantor Kecamatan)	4 dok	33,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan (Kantor Kecamatan)	4 dok	36,300,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gratitunon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan (Kantor Kelurahan)	4 dok	82,500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan	Kelurahan Gratitunon	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan (Kantor Kelurahan)	4 dok	90,750,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kantor Kecamatan Grati	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang adminduk	1 kgt	3,850,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kantor Kecamatan Grati	Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang adminduk	1 kgt	4,235,000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah pemberian layanan administrasi kependudukan	7 layanan	3,850,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah pemberian layanan administrasi kependudukan	7 layanan	4,235,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 lap	5,500,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 lap	6,050,000	
	Plaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kantor Kecamatan Grati	Terlaksananya tugas pelimpahan kewenangan Pemungutan PBB-P2	65%	5,500,000	Plaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kantor Kecamatan Grati	Terlaksananya tugas pelimpahan kewenangan Pemungutan PBB-P2	70%	6,050,000	
	PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Kecamatan Grati	Persentase Lembaga Kmasyarakatan Desa/ Kel yang Aktif	75%	1,136,300,000	PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Kecamatan Grati	Persentase Lembaga Kmasyarakatan Desa/ Kel yang Aktif	80%	1,249,930,000	
		Kantor Kecamatan Grati	Persentase Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Aktif				Kantor Kecamatan Grati	Persentase Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Aktif			

	Koord. Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Kecamatan Grati	Meningkatnya klmprk masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masy	8 kelompok	91,300,000	Koord. Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Kecamatan Grati	Meningkatnya klmprk masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masy	10 kelompok	100,430,000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masy yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wil Kerja Kec	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Prog. Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	16 dok	6,050,000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masy yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wil Kerja Kec	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Prog. Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	16 dok	6,655,000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 lap	85,250,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 lap	93,775,000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Gratitunon	Prosentase realisasi usulan kegiatan pemberdayaan dan pemenuhan sarpras masy kelurahan	60%	1,045,000,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Gratitunon	Prosentase realisasi usulan kegiatan pemberdayaan dan pemenuhan sarpras masy kelurahan	70%	1,149,500,000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gratitunon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 sarpras	660,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gratitunon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 sarpras	726,000,000	
	Pemberdayaan Masy di Kelurahan	Kelurahan Gratitunon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 pokmas	385,000,000	Pemberdayaan Masy di Kelurahan	Kelurahan Gratitunon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 pokmas	423,500,000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Kecamatan Grati	Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai kewenangan	100%	13,750,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kantor Kecamatan Grati	Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai kewenangan	100%	15,125,000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Terlaksananya Tugas Pemerintahan Umum	3 kgt	13,750,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Kecamatan Grati	Terlaksananya Tugas Pemerintahan Umum	3 kgt	15,125,000	

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 org/ siswa	13,750,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 org/ siswa	15,125,000	
	PROG. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kantor Kecamatan Grati	Persentase Kegiatan Koordinasi Trantibum	100%	35,200,000	PROG. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kantor Kecamatan Grati	Persentase Kegiatan Koordinasi Trantibum	100%	38,720,000	
	Koord. Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Kecamatan Grati	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	100%	26,950,000	Koord. Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kantor Kecamatan Grati	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	100%	29,645,000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	5,500,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	6,050,000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 laporan	21,450,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 laporan	23,595,000	
	Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kantor Kecamatan Grati	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	1 kgt	8,250,000	Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kantor Kecamatan Grati	Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	1 kgt	9,075,000	
	Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	8,250,000	Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	9,075,000	
	PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kantor Kecamatan Grati	Persentase Tata Kelola Pemdes sesuai ketentuan	70%	53,700,000	PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kantor Kecamatan Grati	Persentase Tata Kelola Pemdes sesuai ketentuan	80%	49,995,000	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Kantor Kecamatan Grati	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	70%	53,700,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Kantor Kecamatan Grati	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	80%	49,995,000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 dok	13,200,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 dok	14,520,000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	5,500,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 dok	6,050,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 dok	13,200,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 dok	14,520,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	7,500,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa	14 dok	85,250,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7 dok	8,250,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 dok	6,050,000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kantor Kecamatan Grati	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 dok	6,655,000	
			Jumlah total keseluruhan		14,581,391,739			Jumlah total keseluruhan		15,875,900,913	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Kecamatan Grati Tahun 2026 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat. Berikut tahapan-tahapan hasil dari musrenbang:

- a. Bahwa usulan program/ kegiatan yang dibahas didalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun/ lingkungan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- b. Dalam Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing OPD.

Dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Grati dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan. Namun pada Musrenbang tahun 2025 untuk usulan pembangunan tahun 2026 tidak ada usulan yang terakomodir seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Grati

No		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Grati, dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Grati telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel : **IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN PASURUAN**

NO	KEBIJAKAN NASIONAL/ PROVINSI	SUMBER	KETERANGAN
A I.	NASIONAL Arah Kebijakan Nasional : - Peningkatan Pelayanan Terpadu di Kecamatan	Arah Kebijakan Nasional Tahun 2024	Oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas
B. II.	PROVINSI Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur - Peningkatan Pelayanan Terpadu di Kecamatan		

Tabel : **PRIORITAS DAERAH DAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2026**

NO	PRIOTAS DAERAH	PRIORTAS OPD
1.	Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Perluasan Kesempatan Bekerja dan Berusaha serta Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi pada Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang didukung oleh Kelembagaan Ekonomi Desa dan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas	1. Pelatihan Ketrampilan Inklusif berbasis Teknologi Informasi 2. Pemanfaatan potensi ekonomi lokal 3. Penguatan ekonomi masyarakat melalui tata kelola dan manajemen BUMDesa
2.	Peningkatan Kualitas SDM melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penurunan Prevelensi Stunting dan Penanganan Kemiskinan	1. Peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan Kader Posyandu 2. Peningkatan peran perempuan dalam perencanaan pembangunan dan

	Berbasis Kesetaraan Gender	kegiatan ekonomi keluarga
3.	Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Buatan dengan Memperhatikan Mitigasi Bencana	Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan bertanggung jawab
4.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman melalui Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemenuhan Air Minum yang Layak dan Pengelolaan Sanitasi	Pengembangan Sarana dan Prasarana yang Berwawasan Lingkungan dan Berdampak Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat
5.	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Didukung Profesionalitas Sumber Daya Aparatur	1. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan Ketertiban dan Ketentraman Umum melalui konsep PAM SWAKARSA 2. Peningkatan skor IKM melalui inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi
6.	Peningkatan potensi di Kecamatan Grati meliputi wisata Danau Ranu dan UMKM yang mayoritas produknya berbahan ikan lempuk yaitu ikan endemik Danau Ranu dan telur asin.	1. Arah pengembangan yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi terhadap para pelaku UMKM yang bekerjasama dengan dinas terkait dengan materi yang diberikan yaitu terkait bagaimana pengembangan UMKM baik dari segi pendanaan, pengolahan, dan packaging.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Grati

Renstra Kecamatan Grati disusun dalam periode tiga tahun. Berdsarkan tujuan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Psuruan, maka tujuan dan sasaran Kecamatan Grati adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Yang mana dapat diperoleh dari hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017.
- b. Sasaran
 - Sasaran 1

Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan.

Indikator : Persentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan.

Yang mana dapat diperoleh melalui hasil Rata-rata capaian indikator kinerja program, yang mana formulasi perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Rata}^2 \text{ Capaian Indikator Kinerja Program} = \frac{\text{Jumlah Capaian Indikator kinerja Program}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Program}}$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Program} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

➤ Sasaran 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indaktor : Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang mana dapat diperoleh dari hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian managemen kinerja sesuai dengan Permenpan RB No. 88 Tahun 2021.

Adapun Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bangil merupakan Sinkronisasi dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mana dapat dilihat pada tabel 3.2A dan tabel 3.2B di bawah ini:

Tabel 3.2.A
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Target 2026
Tujuan dan sasaran sesuai Renstra 2024-2026				
Tujuan :				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan	99.3	95	98
Sasaran :				
Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan	100	100	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.2	78	80

Tabel 3.2.B

Sinkronisasi Indikator Sasaran RPD dan IKU

Indikator Sasaran RPD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2026	Indikator	Formulasi	Target 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
IKM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	RATA-RATA IKM PD	93.75	IKM Kecamatan	Hasil Penghitungan IKM berdasarkan Aplikasi e-tamu	98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA
NILAI SAKIP	Hasil Evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB	81.4	Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan	Rata-rata capaian indikator program	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	80	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

3.3.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Mebelair
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan)
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan)
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa

Berdasarkan uraian program, kegiatan, dan subkegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah program pada renja tahun 2026 berjumlah 6 Program, jumlah kegiatan berjumlah 15 kegiatan, dan jumlah subkegiatan berjumlah 37 subkegiatan.

PEMETAAN NOMENKLATUR PROG/KEG/SUBKEG PADA DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TERHADAP SIPD

Perangkat Daerah : Kecamatan Grati
Urusan : Kewilayahan

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						SIPD tahun 2026 (Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)				
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	- Pemutakhiran ; atau - Penonaktifan;	KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan			
	2) Program						2) Program			
	3) Kegiatan						3) Kegiatan			
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.01	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA		Persentase Kebutuhan Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi	persentase		7.01.01	PROG. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA		Persentase Kebutuhan Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi	persentase
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase dokumen pengendalian SAKIP	persentase		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase dokumen pengendalian SAKIP	persentase
7.01.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen
7.01.01.2.01.2	Koord. dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.01.2	Koord. dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen

7.01.01.2.01.4	Koord. dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.01.4	Koord. dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen
7.01.01.2.01.5	Koord. dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.01.5	Koord. dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen
7.01.01.2.01.6	Koord. dan Peny. Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.01.6	Koord. dan Peny. Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan
7.01.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan
7.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	persentase		7.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	persentase
7.01.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang
7.01.01.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen
7.01.01.2.02.3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.02.3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen

7.01.01.20.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan adm BMD	persentase		7.01.01.20.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan adm BMD	persentase
7.01.01.02.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.02.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen
7.01.01.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan
7.01.01.20.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	persentase		7.01.01.20.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan	persentase
7.01.01.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket
7.01.01.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen
7.01.01.2.05.4	Koord. dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.05.4	Koord. dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen
7.01.01.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen
7.01.01.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	pegawai	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	pegawai

7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah org yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah org yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum	persentase		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum	persentase
7.01.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket
7.01.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket
7.01.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket
7.01.01.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket
7.01.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket
7.01.01.2.03.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.03.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen
7.01.01.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan
7.01.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koord. dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koord. dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan

7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	Penonaktifan		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit
7.01.01.2.07.5	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.07.5	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket
7.01.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit
7.01.01.2.07.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.07.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit
	Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Penonaktifan	7.01.01.2.07.8	Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan

7.01.01.2.08.3	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.08.3	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Brg Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Brg Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase
7.01.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit
7.01.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit
7.01.01.2.09.5	Pemeliharaan Meubelair	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.09.5	Pemeliharaan Meubelair	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit
7.01.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit

7.01.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit
7.01.02	PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan yang Terfasilitasi Tepat Waktu	persentase		7.01.02	PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan yang Terfasilitasi Tepat Waktu	persentase
7.01.02.2.01	Koord. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemerintahan yang dpt dikoordinasikan dan dilaksanakan	persentase		7.01.02.2.01	Koord. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase kegiatan pemerintahan yang dpt dikoordinasikan dan dilaksanakan	persentase
7.01.02.2.01.1	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.02.2.01.1	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan
7.01.02.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan (Kantor Kecamatan)	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.02.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan (Kantor Kecamatan)	dokumen
7.01.02.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan (Kantor Kelurahan)	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.02.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tk Kecamatan (Kantor Kelurahan)	dokumen

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang adminduk	kegiatan		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang adminduk	kegiatan
7.01.02.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pemberian layanan administrasi kependudukan	layanan	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.02.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pemberian layanan administrasi kependudukan	layanan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan
7.01.02.2.04.3	Plaksanaan Urusan Pemerintan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya tugas pelimpahan kewenangan Pemungutan PBB-P2	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.02.2.04.3	Plaksanaan Urusan Pemerintan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya tugas pelimpahan kewenangan Pemungutan PBB-P2	dokumen
7.01.03	PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Kmasyarakatan Desa/ Kel yang Aktif	persentase		7.01.03	PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Kmasyarakatan Desa/ Kel yang Aktif	persentase
			Persentase Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Aktif	persentase					Persentase Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Aktif	persentase
7.01.03.2.01	Koord. Kegiatan Pemberdayaan Desa		Meningkatnya klmpk masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masy	pokmas		7.01.03.2.01	Koord. Kegiatan Pemberdayaan Desa		Meningkatnya klmpk masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masy	pokmas

7.01.03.2.01.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masy yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Prog. Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.03.2.01.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masy yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Prog. Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	dokumen
7.01.03.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.03.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Prosentase realisasi usulan kegiatan pemberdayaan dan pemenuhan sarpras masy kelurahan	prosentase		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Prosentase realisasi usulan kegiatan pemberdayaan dan pemenuhan sarpras masy kelurahan	prosentase
7.01.03.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.03.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	sarpras
7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masy di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.03.2.02.3	Pemberdayaan Masy di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pokmas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai kewenangan	prosentase		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai kewenangan	prosentase
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terlaksananya Tugas Pemerintahan Umum	prosentase		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terlaksananya Tugas Pemerintahan Umum	prosentase

7.01.05.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.05.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang
7.01.04	PROG. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Kegiatan Koordinasi Trantibum	prosentase		7.01.04	PROG. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Kegiatan Koordinasi Trantibum	prosentase
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	prosentase		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	prosentase
7.01.04.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.04.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan
7.01.04.2.01.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.04.2.01.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan

7.01.04.2.02	Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	persentase		7.01.04.2.02	Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	persentase
7.01.04.2.02.1	Koordinasi Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.04.2.02.1	Koordinasi Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan
7.01.06	PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Tata Kelola Pemdes sesuai ketentuan	persentase		7.01.06	PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Tata Kelola Pemdes sesuai ketentuan	persentase
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	persentase		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	persentase
7.01.06.2.01.7	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.06.2.01.7	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen
7.01.06.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.06.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen
7.01.06.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokuemn	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.06.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokuemn

7.01.06.2.01.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.06.2.01.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen
7.01.06.2.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.06.2.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dokumen
7.01.06.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen	Pemutakhiran kode subkegiatan	7.01.06.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	dokumen

3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2026

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Tabel 3.3

lihat tabel 3.4 kolom 2

IKU RPD	Tema 2026	Prioritas Pembangunan		Subkegiatan	Kegiatan	Program	33 Program Prioritas
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Peleyanan Publik yang Prima	Hilirisasi Potensi Unggulan Daerah	PPD 4 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif dan berbasis digital	Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Kecamatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penunjang Pembangunan (Pembangunan Drainase, Pavingisasi, TP di Lingkungan Kelurahan)
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelyurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penunjang Menciptakan Wirausaha

3.3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis

Tabel 3.4

Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2026

No	Uraian 33 Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Indikator Subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber dana (DAU/ DAK/ DBHBHT/ ... disebutkan)	Lokasi sasaran			Keterangan
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik) **)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	UMK naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah	Kecamatan Grati	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 lap	100,000,000	DAU		14 desa / 1 kelurahan	Grati	
	Digitalisasi layanan public, pengembangan pasuruan satu data dan SPBE	Kecamatan Grati	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pemberian layanan administrasi kependudukan	7 layanan	100,000,000	DAU		14 desa / 1 kelurahan	Grati	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi tentang rumusan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Grati Tahun 2024 disertai dengan Indikator Kinerja dan pagu indikatif. Rumusan rencana program dan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun.
- 2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
- 3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas pada masing-masing desa di wilayah Kecamatan Grati

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2026 sebagaimana pada tabel berikut :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Pasuruan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan	Kec. Grati	100%	Rp 7,765,000,000	DAU		100%	Rp 8,541,500,000
						Belanja operasi : Rp 7,765,000,000				
						Belanja pegawai : Rp 7,500,000,000				
						Belanja barang dan jasa : Rp 265,000,000				
						Belanja bunga :				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Grati	22 org/ bln	Rp 7,500,000,000	DAU		22 org/ bln	Rp 8,250,000,000
						Belanja operasi : Rp 7,500,000,000				
						Belanja pegawai : Rp 7,500,000,000				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Grati	4 dok	Rp 200,000,000	DAU		4 dok	Rp 220,000,000
						Belanja operasi : Rp 200,000,000				

						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 200,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Grati	4 dok	Rp 65,000,000	DAU		4 dok	Rp 71,500,000
						Belanja operasi : Rp 65,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 65,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan adm BMD	Kec. Grati	100%	Rp -	DAU		100%	Rp -
						Belanja operasi : Rp -				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				

						Belanja hibah	:	Rp	-				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
						Belanja modal	:	Rp	-				
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
						Belanja transfer	:	Rp	-				
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Grati	2 dok			Rp	-	DAU		4 dok	Rp -
						Belanja operasi	:	Rp	-				
						Belanja pegawai	:	Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	-				
						Belanja bunga	:	Rp	-				
						Belanja subsidi	:	Rp	-				
						Belanja hibah	:	Rp	-				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
						Belanja modal	:	Rp	-				
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
						Belanja transfer	:	Rp	-				
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Grati	5 lap			Rp	-	DAU		5 lap	Rp -
						Belanja operasi	:	Rp	-				
						Belanja pegawai	:	Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	-				
						Belanja bunga	:	Rp	-				
						Belanja subsidi	:	Rp	-				
						Belanja hibah	:	Rp	-				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
						Belanja modal	:	Rp	-				

[illegible]

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Grati	5 dok	Rp -	DAU		5 dok	Rp -
						Belanja operasi : Rp -				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Koord. dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Grati	12 dok	Rp -	DAU		12 dok	Rp -
						Belanja operasi : Rp -				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Grati	16 dok	Rp -	DAU		16 dok	Rp -

						Belanja operasi	:	Rp	-					
						Belanja pegawai	:	Rp	-					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	-					
						Belanja bunga	:	Rp	-					
						Belanja subsidi	:	Rp	-					
						Belanja hibah	:	Rp	-					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-					
						Belanja modal	:	Rp	-					
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-					
						Belanja transfer	:	Rp	-					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Grati	20 orang			Rp	-	DAU		20 orang		Rp -
						Belanja operasi	:	Rp	-					
						Belanja pegawai	:	Rp	-					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	-					
						Belanja bunga	:	Rp	-					
						Belanja subsidi	:	Rp	-					
						Belanja hibah	:	Rp	-					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-					
						Belanja modal	:	Rp	-					
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-					
						Belanja transfer	:	Rp	-					
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah org yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Grati	30 orang			Rp	-	DAU		30 orang		Rp -
						Belanja operasi	:	Rp	-					
						Belanja pegawai	:	Rp	-					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	-					

						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum	Kec. Grati	100%	Rp 1,450,000,000	DAU		100%	Rp 1,595,000,000
						Belanja operasi : Rp 1,450,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 1,450,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Grati	4 paket	Rp 150,000,000	DAU		4 paket	Rp 165,000,000
						Belanja operasi : Rp 150,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 150,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp				

[illegible]

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Grati	4 paket	Rp150,000,000	DAU		4 paket	Rp165,000,000
						Belanja operasi : Rp150,000,000				
						Belanja pegawai : Rp-				
						Belanja barang dan jasa : Rp150,000,000				
						Belanja bunga : Rp-				
						Belanja subsidi : Rp-				
						Belanja hibah : Rp-				
						Belanja bantuan sosial : Rp-				
						Belanja modal : Rp-				
						Belanja tidak terduga : Rp-				
						Belanja transfer : Rp-				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Grati	4 paket	Rp150,000,000	DAU		4 paket	Rp165,000,000
						Belanja operasi : Rp150,000,000				
						Belanja pegawai : Rp-				
						Belanja barang dan jasa : Rp150,000,000				
						Belanja bunga : Rp-				
						Belanja subsidi : Rp-				
						Belanja hibah : Rp-				
						Belanja bantuan sosial : Rp-				
						Belanja modal : Rp-				
						Belanja tidak terduga : Rp-				
						Belanja transfer : Rp-				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Grati	365 dok/ expl	Rp-	DAU		365 dok/ expl	Rp-
						Belanja operasi : Rp-				

						Belanja pegawai	:	Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	-				
						Belanja bunga	:	Rp	-				
						Belanja subsidi	:	Rp	-				
						Belanja hibah	:	Rp	-				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
						Belanja modal	:	Rp	-				
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
						Belanja transfer	:	Rp	-				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Grati	10 lap		Rp	150,000,000	DAU		10 lap		Rp	165,000,000
						Belanja operasi	:	Rp	150,000,000				
						Belanja pegawai	:	Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	150,000,000				
						Belanja bunga	:	Rp	-				
						Belanja subsidi	:	Rp	-				
						Belanja hibah	:	Rp	-				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
						Belanja modal	:	Rp	-				
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
						Belanja transfer	:	Rp	-				
	Penyelenggaraan Rapat Koord. dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Grati	15 lap		Rp	350,000,000	DAU		15 lap		Rp	385,000,000
						Belanja operasi	:	Rp	350,000,000				
						Belanja pegawai	:	Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	350,000,000				
						Belanja bunga	:	Rp	-				
						Belanja subsidi	:	Rp	-				

						Belanja hibah	:	Rp	-					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-					
						Belanja modal	:	Rp	-					
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-					
						Belanja transfer	:	Rp	-					
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Grati	15 lap			Rp	-	DAU		-		Rp -
						Belanja operasi	:	Rp	-					
						Belanja pegawai	:	Rp	-					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	-					
						Belanja bunga	:	Rp	-					
						Belanja subsidi	:	Rp	-					
						Belanja hibah	:	Rp	-					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-					
						Belanja modal	:	Rp	-					
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-					
						Belanja transfer	:	Rp	-					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Grati	100%			Rp	300,000,000	DAU		100%		Rp 330,000,000
						Belanja operasi	:	Rp	300,000,000					
						Belanja pegawai	:	Rp	-					
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	300,000,000					
						Belanja bunga	:	Rp	-					
						Belanja subsidi	:	Rp	-					
						Belanja hibah	:	Rp	-					
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-					

[illegible]

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Grati	3 unit	Rp50,000,000	DAU		1 paket	Rp55,000,000
						Belanja operasi : Rp50,000,000				
						Belanja pegawai : Rp-				
						Belanja barang dan jasa : Rp50,000,000				
						Belanja bunga : Rp-				
						Belanja subsidi : Rp-				
						Belanja hibah : Rp-				
						Belanja bantuan sosial : Rp-				
						Belanja modal : Rp-				
						Belanja tidak terduga : Rp-				
						Belanja transfer : Rp-				
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kec. Grati	1 unit	Rp-	DAU		-	Rp-
						Belanja operasi : Rp-				
						Belanja pegawai : Rp-				
						Belanja barang dan jasa : Rp-				
						Belanja bunga : Rp-				
						Belanja subsidi : Rp-				
						Belanja hibah : Rp-				
						Belanja bantuan sosial : Rp-				
						Belanja modal : Rp-				
						Belanja tidak terduga : Rp-				
						Belanja transfer : Rp-				
	Pengadaan Sarpras Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Grati	-	Rp-	DAU		-	Rp-
						Belanja operasi : Rp-				

						Belanja pegawai	:	Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	-				
						Belanja bunga	:	Rp	-				
						Belanja subsidi	:	Rp	-				
						Belanja hibah	:	Rp	-				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
						Belanja modal	:	Rp	-				
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
						Belanja transfer	:	Rp	-				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Grati	100%	Rp 150,000,000		DAU		100%	Rp 165,000,000		
						Belanja operasi	:	Rp	150,000,000				
						Belanja pegawai	:	Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	150,000,000				
						Belanja bunga	:	Rp	-				
						Belanja subsidi	:	Rp	-				
						Belanja hibah	:	Rp	-				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
						Belanja modal	:	Rp	-				
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
						Belanja transfer	:	Rp	-				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Grati	4 lap	Rp 150,000,000		DAU		4 lap	Rp 165,000,000		
						Belanja operasi	:	Rp	150,000,000				
						Belanja pegawai	:	Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	150,000,000				
						Belanja bunga	:						

						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Grati	4 lap	Rp -	DAU		4 lap	Rp -
						Belanja operasi : Rp -				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Grati	12 lap	Rp -	DAU		12 lap	Rp -
						Belanja operasi : Rp -				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				

						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Brg Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Grati	100%	Rp 1,400,000,000	DAU		100%	Rp 1,540,000,000
						Belanja operasi : Rp 1,400,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 1,400,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Grati	1 unit	Rp 250,000,000	DAU		1 unit	Rp 275,000,000
						Belanja operasi : Rp 250,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 250,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				

[illegible]

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Grati	10 unit	Rp 250,000,000	DAU		10 unit	Rp 275,000,000
						Belanja operasi : Rp 250,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 250,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Grati	4 gedung	Rp 250,000,000	DAU		4 gedung	Rp 275,000,000
						Belanja operasi : Rp 250,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 250,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Grati	2 gedung	Rp 250,000,000	DAU		-	Rp 275,000,000
						Belanja operasi : Rp 250,000,000				

						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 250,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	PROG. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan yang Terfasilitasi Tepat Waktu	Kec. Grati	100%	900,000,000				Rp 990,000,000
	Koord. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase keg pemrintahn yang dpt dikoordinasikan dan dilaksanakan	Kec. Grati	100%	700,000,000				Rp 770,000,000
						Belanja operasi : Rp 700,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 700,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				

[illegible]

[illegible]

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pemberian layanan administrasi kependudukan	Kec. Grati	7 layanan	Rp 100,000,000	DAU		4 dok	Rp 110,000,000
						Belanja operasi : Rp 100,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 100,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Grati	1 keh	100,000,000				Rp 110,000,000
						Belanja operasi : Rp 100,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 100,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Plaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Terlaksananya tugas pelimpahan kewenangan Pemungutan PBB-P2	Kec. Grati	65%	Rp 100,000,000	DAU		70%	Rp 110,000,000

						Belanja operasi : Rp 100,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 100,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Kmasyarakatan Desa/ Kel yang Aktif	Kec. Grati	100%	1,950,000,000				Rp 2,145,000,000
			Persentase Kelompok Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Aktif							
	Koord. Kegiatan Pemberdayaan Desa		Meningkatnya klmpk masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kec. Grati	100%	200,000,000				Rp 220,000,000
						Belanja operasi : Rp 200,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 200,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				

[illegible]

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Prosentase realisasi usulan kegiatan pemberdayaan dan pemenuhan sarpras masy kelurahan	Kec. Grati	100%	1,750,000,000				Rp 1,925,000,000
						Belanja operasi : Rp 1,750,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 1,750,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Grati	7 sarpras	Rp 1,000,000,000	DAU		10 sarpras	Rp 1,100,000,000	
					Belanja operasi : Rp 1,000,000,000					
					Belanja pegawai : Rp -					
					Belanja barang dan jasa : Rp 1,000,000,000					
					Belanja bunga : Rp -					
					Belanja subsidi : Rp -					
					Belanja hibah : Rp -					
					Belanja bantuan sosial : Rp -					
					Belanja modal : Rp -					
					Belanja tidak terduga : Rp -					
					Belanja transfer : Rp -					
Pemberdayaan Masy di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Grati	6 pokmas	Rp 750,000,000	DAU		8 pokmas	Rp 825,000,000	

[illegible]

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Grati	150 orang / keg	Rp 500,000,000	DAU		150 orang / keg	Rp 550,000,000
						Belanja operasi : Rp 500,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 500,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	PROG. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Kegiatan Koordinasi Trantibum	Kec. Grati	100%	500,000,000	DAU		100%	Rp 550,000,000
	Koord. Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan	Kec. Grati	3 keg	500,000,000	DAU		3 keg	Rp 550,000,000
						Belanja operasi : Rp 500,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 500,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				

						Belanja hibah	:	Rp	-				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
						Belanja modal	:	Rp	-				
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
						Belanja transfer	:	Rp	-				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Grati	2 lap	Rp	250,000,000	DAU		2 lap		Rp	275,000,000
						Belanja operasi	:	Rp	250,000,000				
						Belanja pegawai	:	Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	250,000,000				
						Belanja bunga	:	Rp	-				
						Belanja subsidi	:	Rp	-				
						Belanja hibah	:	Rp	-				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
						Belanja modal	:	Rp	-				
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
						Belanja transfer	:	Rp	-				
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Grati	3 lap	Rp	250,000,000	DAU		3 lap		Rp	275,000,000
						Belanja operasi	:	Rp	250,000,000				
						Belanja pegawai	:	Rp	-				
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	250,000,000				
						Belanja bunga	:	Rp	-				
						Belanja subsidi	:	Rp	-				
						Belanja hibah	:	Rp	-				
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				

						<i>Belanja modal</i> : Rp -				
						<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				
						<i>Belanja transfer</i> : Rp -				
	Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		Implementasi ketentuan yang ada dalam Perda	Kec. Grati	3 keg	-	DAU		3 keg	Rp -
						<i>Belanja operasi</i> : Rp -				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						<i>Belanja modal</i> : Rp -				
						<i>Belanja tidak terduga</i> : Rp -				
						<i>Belanja transfer</i> : Rp -				
	Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Grati	1 lap	Rp -	DAU		1 lap	Rp -
						<i>Belanja operasi</i> : Rp -				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				

						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	PROG. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Tata Kelola Pemdes sesuai ketentuan	Kec. Grati	100%	272,229,932	DAU		100%	Rp 299,452,925
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa		Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Grati	3 keg	272,229,932	DAU		3 keg	Rp 299,452,925
						Belanja operasi : Rp 272,229,932				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 272,229,932				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Grati	14 dok	Rp -	DAU		14 dok	Rp -
						Belanja operasi : Rp -				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				

						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Grati	14 dok	Rp 150,000,000	DAU		14 dok	Rp 165,000,000
						Belanja operasi : Rp 150,000,000				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 150,000,000				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Grati	14 dok	Rp 122,229,932	DAU		14 dok	Rp 134,452,925
						Belanja operasi : Rp 122,229,932				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 122,229,932				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				

						Belanja tidak terduga	:	Rp	-						
						Belanja transfer	:	Rp	-						
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Grati	14 dok			Rp	-	DAU		14 dok		Rp	-
						Belanja operasi	:	Rp	-						
						Belanja pegawai	:	Rp	-						
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	-						
						Belanja bunga	:	Rp	-						
						Belanja subsidi	:	Rp	-						
						Belanja hibah	:	Rp	-						
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-						
						Belanja modal	:	Rp	-						
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-						
						Belanja transfer	:	Rp	-						
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Grati	7 dok			Rp	-	DAU		-		Rp	-
						Belanja operasi	:	Rp	-						
						Belanja pegawai	:	Rp	-						
						Belanja barang dan jasa	:	Rp	-						
						Belanja bunga	:	Rp	-						
						Belanja subsidi	:	Rp	-						
						Belanja hibah	:	Rp	-						
						Belanja bantuan sosial	:	Rp	-						
						Belanja modal	:	Rp	-						
						Belanja tidak terduga	:	Rp	-						
						Belanja transfer	:	Rp	-						

[illegible]

BAB V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Renja Kecamatan Grati Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Grati yang berpedoman pada rencana strategi Kecamatan Grati periode 2024-2026.

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

1. Program dan kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD Kecamatan Grati;
2. Program dan kegiatan yang direncanakan menampung usulan-usulan dari masing-masing seksi dan sub bagian;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan adalah untuk melakukan penilaian terhadap kinerja aparat di Kecamatan Grati dan jika perlu akan dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian organisasi.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Renja Kecamatan Grati Tahun 2026 hal ini merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategi periode 2024-2026 pelaksanaanya memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Renja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program dari Kepala Daerah, rencana dan agenda-agenda Pembangunan periode lima tahun kedepan dalam rangka mengaktualisasikan perencanaan dalam RPJMD tersebut menjadi dokumen perencanaan Tahunan berupa penjabaran suatu rencana strategis ke dalam Rencana

operasional yang untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. dengan tujuan antara perencanaan dan penganggaran Tahunan maka SKPD akan menyusun Rencana Kerja Tahunan.

2. Seluruh satuan kerja pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkewajiban menyusun Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasuruan. Adapun untuk sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra SKPD yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran strategis Kabupaten sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD.
3. Rencana strategis SKPD merupakan pedoman, dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya akan berfungsi dalam penetapan Kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
4. Adapun sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten, SKPD sebagai Instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator Kinerja bagi kepentingan masing-masing SKPD berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh SKPD untuk setiap tahunnya merupakan pedoman dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan yang berkelanjutan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Dukungan dari semua pihak guna memberikan sumbangsih pemikiran, saran dan informasi agar didalam pengambil kebijakan administrasi publik dan perjalanan terhadap masyarakat.
2. Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan SKPD, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian, pengawasan hal ini sebagai bahan acuan dalam perumusan rencana kerja tahunan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan publik
3. Pengembangan potensi wilayah dengan mendorong pengembangan ekonomi sektor riil di setiap desa, melalui penyelarasan perencanaan program dan kegiatan yang *holistic* dan *suistainable*
4. Mengkonsolidasi potensi dan mendorong pelibatan masyarakat dalam rangka memproyeksi *comunity development*, sehingga terwujud tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

RKPD menjadi pedoman Kecamatan Grati dalam menyusun RKA Tahun 2026. Selain itu, RKPD Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil RKPD 2026 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Grati dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Grati.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Grati dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Diharapkan proses penyusunan RKPD yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan daerah menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera dan Maslahat.

Pasuruan, September 2025

KAMAT GRATI



NANANG MUJI LAKSONO, S.H, M.Hum

Pembina Tk. I

NIP 196803131989101002

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Bab Penutup menjelaskan beberapa hal yaitu kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

5.1 Kesimpulan Penting

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. saling bersinergi mendukung tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu “Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.
2. mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2026.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang harus diperhatikan:

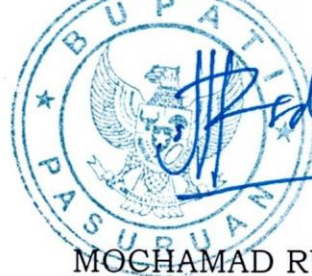
1. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta selanjutnya menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.
2. Selama pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian akibat perubahan kondisi atau asumsi yang melandasi perubahan prioritas pembangunan daerah dan diakomodasi dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, maka Renja Perangkat Daerah akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 meliputi pemantauan atau monitoring pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dapat melakukan tindakan koreksi jika diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut setiap triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan.
3. Laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 2, meliputi perkembangan capaian kinerja dan anggaran, faktor pendorong, dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan melalui aplikasi atau sistem informasi yang tersedia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan.
4. Evaluasi dilakukan secara terukur melalui pencapaian target indikator kinerja utama Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah dan dasar penentuan target tahun berikutnya.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO